



**PROGRAM
PRIORITAS
KEMENTERIAN
KEHUTANAN**

**KABINET
MERAH PUTIH**





*Pekerjaan kita harus untuk rakyat.
Bukan kita bekerja untuk diri kita
sendiri, bukan kita bekerja untuk
kerabat kita, bukan kita bekerja
untuk pemimpin pemimpin kita,
**pemimpin yang harus bekerja
untuk rakyat***

- Prabowo Subianto -
20 Oktober 2024



**PROGRAM
PRIORITAS
KEMENTERIAN
KEHUTANAN**

**KABINET
MERAH PUTIH**

1. Digitalisasi Layanan : Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Efisiensi Tata Kelola
2. Penguasaan Hutan yang Berkeadilan
3. Hutan Sebagai Sumber Swasembada Pangan
4. Menjaga Hutan Indonesia sebagai Paru-Paru Dunia
5. Indonesia Satu Peta (One Map Policy)



Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insyaallah kita akan kurangi korupsi secara signifikan

- Prabowo Subianto -
20 Oktober 2024

1. DIGITALISASI LAYANAN : TRANSPARANSI, EFEKTIVITAS, EFISIENSI, AKUNTABILITAS TATA KELOLA

1.1 Digitalisasi Seluruh Layanan Kementerian Kehutanan



PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN KEHUTANAN

Digitalisasi seluruh layanan Kementerian Kehutanan, saat ini total terdapat 31 layanan perizinan di Kementerian Kehutanan.



1.2. Digitalisasi Pembayaran Non-Tunai



PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN KEHUTANAN

Digitalisasi pembayaran non tunai (*cashless payment & e-ticketing*) pada penerapan tarif baru wisata (PP 36/2024) pada 57 kawasan Taman Nasional, 134 Taman Wisata Alam dan 85 Suaka Margasatwa untuk meningkatkan PNBP. (PNBP “tiket sobek” 2023 sebesar 140 miliar rupiah)





*“Saya bertekad untuk menjaga, mengelola dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa **sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh Rakyat Indonesia**”*

- Prabowo Subianto -
Jakarta, 18 September 2024

2. PENGUASAAN HUTAN YANG BERKEADILAN

2.1. Penyelesaian Kasus Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

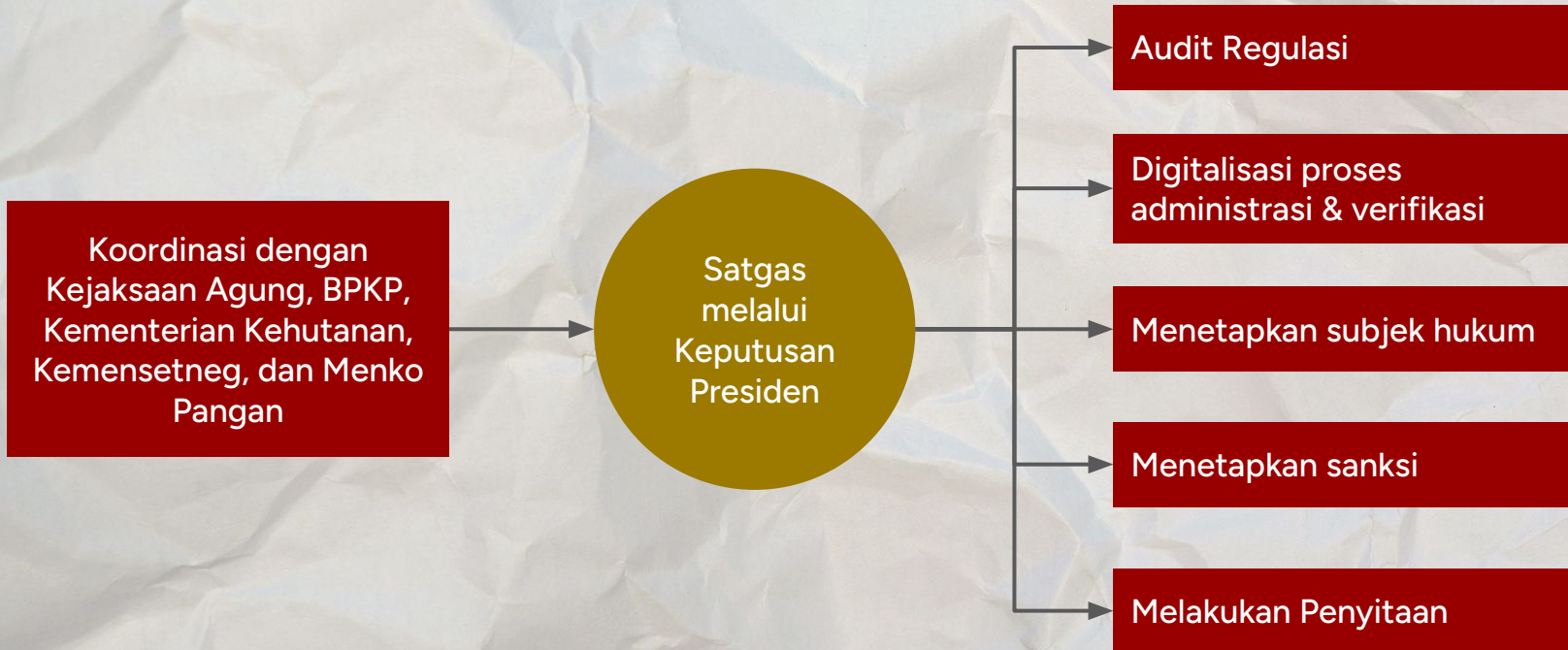


PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN KEHUTANAN

Bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membentuk satuan tugas percepatan penyelesaian kasus sawit ilegal di kawasan hutan (denda administratif yang adil dan atau penyitaan).



2.1. Penyelesaian Kasus Sawit Ilegal di Kawasan Hutan



2.2. Penertiban/Pencabutan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan



PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN KEHUTANAN

Terdapat 601 unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 30,1 juta hektar, dengan rincian 575 unit izin PBPH diterbitkan oleh Menteri Kehutanan seluas 29,9 juta hektar.

Dari 575 unit izin PBPH, terdapat 83 unit tidak aktif seluas $\pm 3,1$ juta hektar \rightarrow berpotensi dicabut

2.3. Audit & Pemberlakuan Sanksi PB-PSWA



PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN KEHUTANAN

104 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) menguasai kawasan konservasi seluas 5.245,49 hektar, dengan hanya membayar 52 miliar rupiah untuk jangka waktu 35-55 tahun

Solusi: Audit perizinan dan aktivitas 104 perusahaan pemegang PB-PSWA dan memberlakukan sanksi administrasi hingga pencabutan izin pada pemegang PB-PSWA.



*Tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mampu **mencapai ketahanan pangan**. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh Rakyat Indonesia*

*- Prabowo Subianto -
20 Oktober 2024*



3. HUTAN SEBAGAI SUMBER SWASEMBADA PANGAN

3.1. Penyediaan Lahan untuk Food Estate



PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN KEHUTANAN

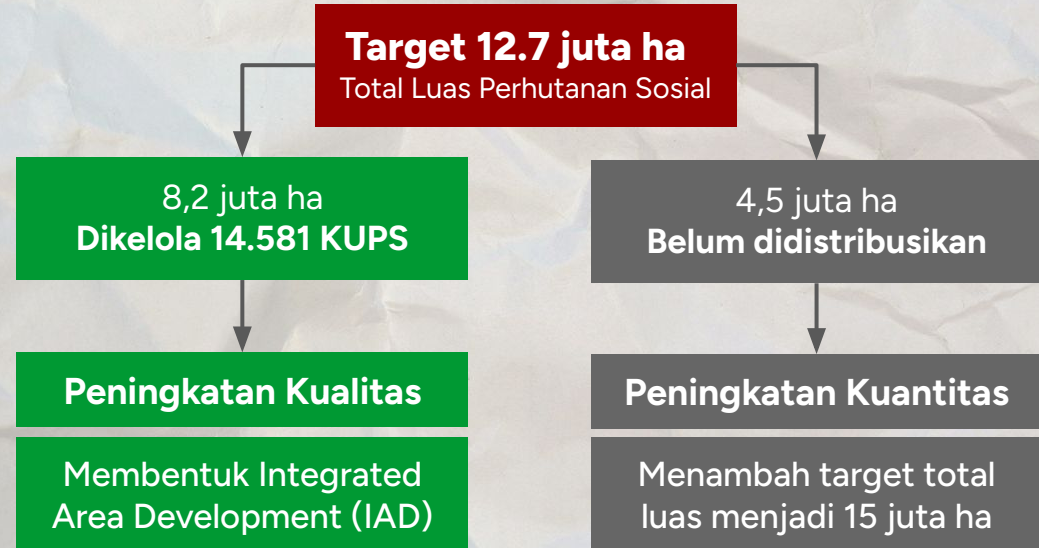
- **Food Estate Besar:** Merauke seluas 1,6 juta ha
- **Food Estate Sedang:** Kalimantan Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, masing-masing ± 100.000 ha
- **Food Estate Kecil:** di beberapa provinsi masing-masing 10.000-20.000 ha



3.2. Perhutanan Sosial untuk Mendukung Makan Bergizi Gratis



PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN KEHUTANAN



1. **Target Kuantitas:** Meningkatkan luas Perhutanan Sosial dari 12,7 juta ha saat ini menjadi 15 juta ha. Hal ini sesuai dengan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) sebesar 15,5 juta ha.
2. **Target Kualitas:** Akan dibentuk Integrated Area Development (IAD) di 8,2 juta lahan sudah didistribusikan kepada rakyat untuk menjadi salah satu rantai pasok program makan bergizi gratis



Benchmarking IAD di Kab. Lumajang (Luas Lahan 940 hektar)

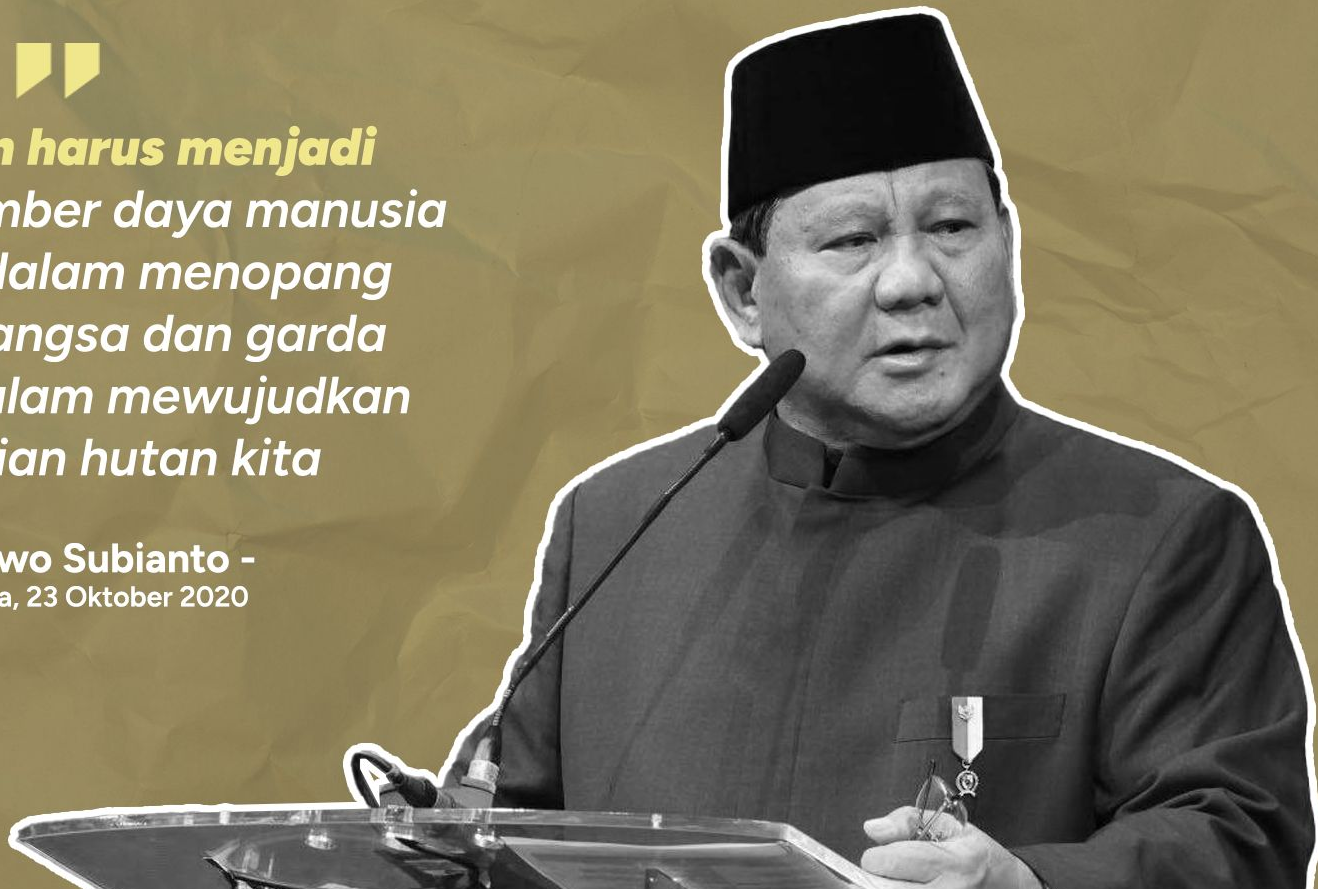
Memberikan nilai transaksi ekonomi masyarakat ± 1 triliun rupiah

- 812 ekor sapi perah dimiliki oleh 216 peternak anggota KUPS (4-6 ekor/KK). Bermitra dengan PT Nestle. Kapasitas produksi susu 1.9 juta liter/tahun
- Produksi susu kambing etawa senduro dengan kapasitas produksi 336.000 liter/tahun
- Produksi pisang mas kirana dan pisang agung semeru 130 Ton/Tahun
- Produksi olahan pertanian (keripik, sale) dengan kapasitas produksi 7,2 Ton/Tahun
- Usaha olahan kopi & biji kopi dengan kapasitas produksi 27 Ton/tahun
- Ternak lebah madu dengan produksi 600 liter/tahun
- Produksi olahan keripik talas 84 Ton/Tahun
- Wisata Siti Sundari & Glagah Arum dengan rata-rata 15.000 pengunjung/tahun



Rimbawan harus menjadi kekuatan sumber daya manusia Indonesia dalam menopang ekonomi bangsa dan garda terdepan dalam mewujudkan kelestarian hutan kita

- Prabowo Subianto -
Yogyakarta, 23 Oktober 2020



4. MENJAGA HUTAN INDONESIA SEBAGAI PARU-PARU DUNIA

4.1. Rehabilitasi Lahan Kritis



PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN KEHUTANAN

Percepatan Target Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada Kawasan Hutan

- Luas lahan kritis 12,7 juta hektar yang terdiri 7,4 juta hektar dalam kawasan hutan dan 5,3 juta hektar luar kawasan hutan
- Kemampuan RHL menggunakan APBN hanya 5.000 hektar/tahun
- Produksi bibit persemaian 45 juta batang/tahun dari 9 persemaian permanen dan 53 persemaian biasa.

Solusi: Menggandeng komunitas, swasta, dan kelompok masyarakat untuk mempercepat rehabilitasi 12,7 juta hektar lahan kritis melalui skema karbon dan perhutanan sosial dengan kemampuan RHL menjadi minimal 250.000 hektar/tahun



4.2 Menjaga Kekayaan Biodiversity



PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN KEHUTANAN

Perlindungan dan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

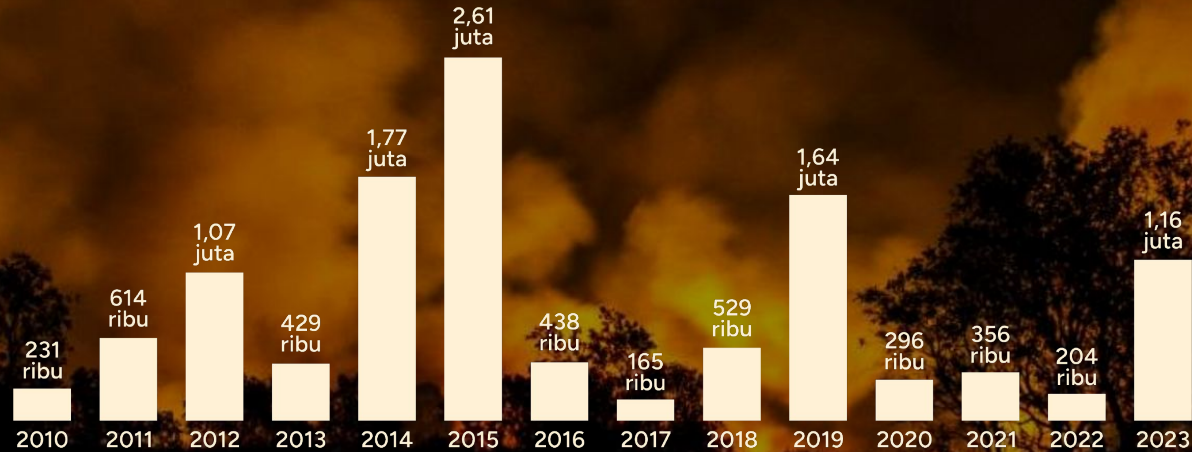
- Terdapat 904 TSL dilindungi yang terdiri dari 117 jenis tumbuhan dan 787 jenis satwa
- Terdapat 899 unit penangkaran TSL dengan nilai investasi Rp 12.8 miliar, tenaga kerja 899 orang, dan devisa hasil penangkaran tahun 2023 Rp 1,7 triliun
- Terdapat 1.089 unit peredaran TSL dalam negeri dan 763 luar negeri dengan nilai investasi sebesar Rp 1 triliun, jumlah tenaga kerja 26.925 orang dan devisa ekspor Rp 9.9 triliun

Solusi:

- Kerjasama dengan universitas dan lembaga riset untuk mengidentifikasi ulang kekayaan keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan sebagai bioprospecting (keperluan medis)
- Meningkatkan devisa ekspor melalui pemberantasan *illegal trade* dan membuat tracing online perdagangan satwa.
- Audit terhadap unit penangkaran TSL, unit peredaran TSL, kuota TSL, dan lembaga konservasi untuk memaksimalkan PNBPN

4.3. Antisipasi Ancaman Kebakaran Hutan

Luas Kebakaran Hutan di Indonesia (hektar)



Terdapat 34 Daerah Operasi (Daops) tersebar di 11 Provinsi dengan dukungan 46 pondok kerja dan 2.413 Manggala Agni

4.3. Antisipasi Ancaman Kebakaran Hutan

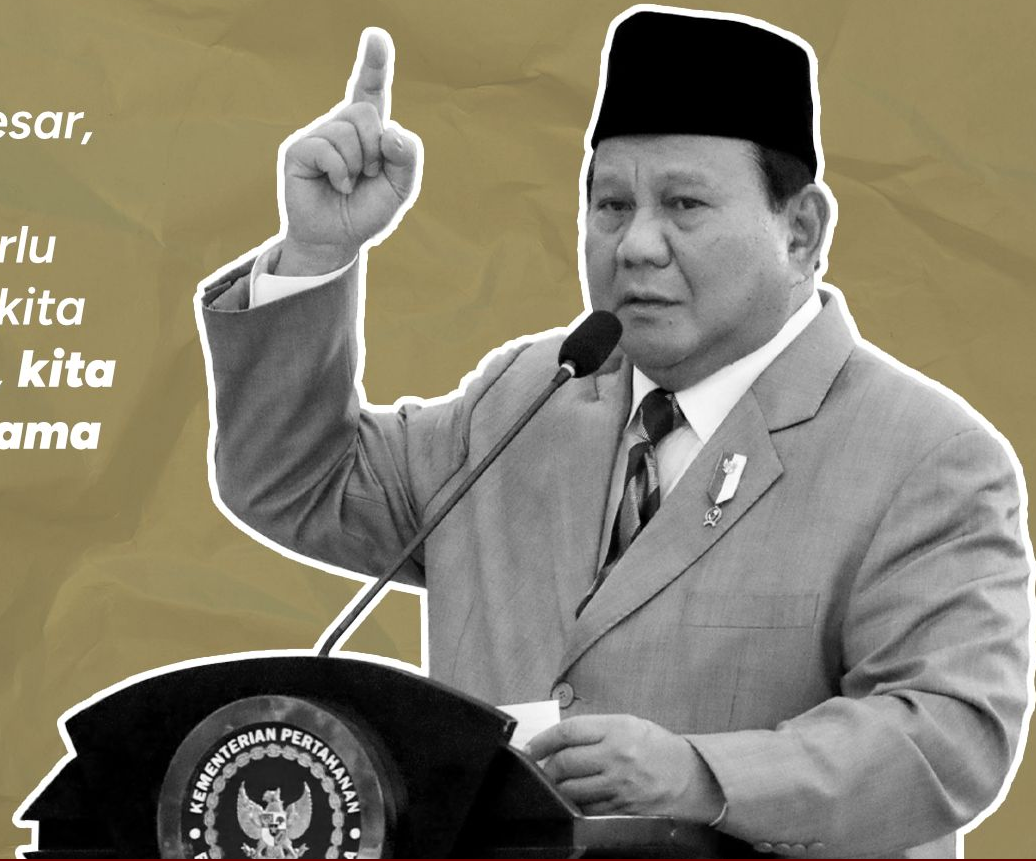


Solusi:

1. Mou dengan BUMN, Setkab, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Ka BMKG, Ka BIG, Ka LAPAN, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk berkolaborasi dalam upaya penanggulangan Karhutla.
2. Melaksanakan fungsi utama rutin pencegahan dengan patrol pencegahan karhutla, peringatan dini dan kesiapsiagaan, penyadartahuan dan pemberdayaan Masyarakat.
3. Revitalisasi sarana dan prasarana Karhutla di 34 Daops Karhutla bekerja sama dengan pihak swasta pemanfaat dan/atau pengelola kawasan hutan
4. Melakukan penyidikan dan monitoring serta tindak lanjut segala hal terkait penanganan proses hukum bidang Karhutla
5. Membekukan layanan hingga pencabutan Persetujuan Berusaha bidang kehutanan bila hasil monitoring dan tindak lanjut penanganan hukum ditemukan unsur kelalaian dan/atau kesengajaan.

“
*Cita-cita yang begitu besar,
yang begitu kita
idam-idamkan, kita perlu
suasana kebersamaan, kita
perlu suasana persatuan, kita
perlu kolaborasi kerja sama*

- Prabowo Subianto -
Jakarta, 20 Oktober 2024



5. INDONESIA SATU PETA (ONE MAP POLICY)

5. Kerjasama Membangun Indonesia Satu Peta



PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN KEHUTANAN

Bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian ATR/BPN untuk membuat kebijakan satu peta tunggal Indonesia (*one map policy*)



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



TERIMA KASIH